

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIAK DALAM PENANGGULANGAI KEMISKINAN DI KECAMATAN MEMPURA
KABUPATEN SIAK (TAHUN 2011-2015)**

Endang Setiowati

Email: Endaangsetiowatii@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono S.IP, M.IP

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

This research is conducted by Siak District Government which succeed especially in Mempura sub-district with existing programs so that it can reduce the number of poor people of Siak Regency and increase people's welfare. According to the Regional Regulation of Siak Regency Year 2012 poverty is a socio-economic condition of a person or group of people who are not fulfilled their basic rights to maintain and develop a life of dignity. As for formulation of the problem in this research is what factors that become the driving force of the succes of the Siak Regency government in poverty reduction in sub-district Mempura in Siak Sri Indrapura.

This research type using qualitative approach with descriptive method. Data collected by the writer use interview and documentation technique. Data used is primary data obtained from informant research and then supported from various government institutions related to this research.

Research shows that in tackling this poverty Siak Sri Indrapura Regecy Government has issued a policy related to poverty namely the Regional Regulation (Perda) No. 10 of 2012 on poverty reduction in Siak Regecy. These succes factors in the form of Government programs according to the local regulation. Resources Human (SDM) and the Regional Poverty Reduction Coordination Team.

Keywords: Succes Factors. Poverty, Local Regulation (Perda)

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Tahun 2012, kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan juga merupakan suatu persoalan masyarakat yang sangat mendasar. Karena di satu sisi menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses Pembangunan. Kemiskinan juga menjadi tanda dari perkembangan ekonomi pasar yang timpang dan kemunduran berbagai institusi sosial di dalam memecahkan persoalan penduduk. Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di dunia ini dari masa ke masa.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan, bahkan di Tingkat International telah dideklarasikan dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di ikuti oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia untuk menyepakati dokumen yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Millinium atau *Millenium Development Goals (MDG's)*. Delapan agenda yang ingin dicapai dalam MDGs antara lain : (1) penanggulangan kemiskinan absolut dan kelaparan yang ingin dicapai pada 2015; (2) pencapaian pendidikan dasar bagi semua anak laki-laki dan perempuan yang ingin dicapai pada tahun 2015; (3) pemberdayaan kesederajatan gender dan perempuan; (4) pengurangan tingkat kematian anak; (5) peningkatan kesehatan ibu; (6) pemberantasan HIV/AIDS dan

penyakit menular lainnya; (7) menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menghentikan perusakan lingkungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan; (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (**Nurhadi, 2007:72**).

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (**Soegijoko, 1997:137**).

Masalah kemiskinan memerlukan langkah- langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak- hak dasar penduduk negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan Program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di Tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak dan Bupati Siak Menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sangat besar baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dalam Kepemimpinannya oleh Drs. H. Syamsuar. M.Si sebagai Bupati dan Drs. H. Alfredi. M.Si sebagai wakil Bupati banyak mengalami kemajuan pesat di segala bidang. Pembangunan dan program serta kegiatan prioritas pelayanan publik terus mengalami peningkatan. Kabupaten Siak juga telah banyak memperoleh berbagai penghargaan di Tingkat Nasional.

Dalam sektor kemiskinan, pemerintah kabupaten Siak berhasil menekan angka kemiskinan, jauh dibandingkan angka nasional dan provinsi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Siak dapat menanggulangi angka kemiskinan di setiap tahunnya, meskipun terdapat kenaikan, namun masih dianggap stabil yaitu diangka 5, 22% pada tahun 2015. Sedangkan pada tingkat kecamatan,

Kecamatan Mempura memiliki angka kemiskinan yang dapat dikatakan tidak tinggi juga tidak rendah, yang dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu banyak.

Tabel angka kemiskinan Kec. Mempura

Tahun	Angka Kemiskinan
2011	956
2012	911
2013	852
2014	760
2015	718

Angka kemiskinan ini Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012. Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Adapun program didalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tersebut terbagi atas empat kriteria yaitu :

1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro atau kecil
4. Program- Pogram lain baik langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

RUMUSAN MASALAH

“Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pemerintah Kabupaten Siak dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura”.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah mengenai kemiskinan serta faktor-faktor keberhasilan yang telah dicapai selama ini.
- b. Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi peneliti yang berminat untuk meneliti tentang penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Mempura.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata ”miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Nurhadi, 2007: 13).

Lebih lanjut Nurhadi (2007: 13) menyebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*povertyline*) atau batas kemiskinan (*povertytresshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan secara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Pada umumnya indikator kemiskinan (Mudrajad Kuncoro: 142) menggunakan kriteria garis kemiskinan (*Poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Salah satu kriteria Garis Kemiskinan yang digunakan adalah versi BPS (Badan Pusat Statistik).

Menurut Chambers dalam Nasukun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

1. Kemiskinan absolut: bila pendapatnya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan natural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti

tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari luar.

4. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap meyebabkan suburnya kemiskinan.

2. Penyebab dan Pengentasan Kemiskinan

Menurut World Bank dalam Nurhadi (2007: 25) dijelaskan bahwa penyebab kemiskinan adalah strategi pembangunan yang terlalu menitikberatkan dan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa proses pembangunan sebagian besar Negara berkembang kurang menyentuh 40% dari lapisan terbawah jumlah penduduknya. Strategi pertumbuhan yang dianut telah mengakibatkan *trickle-up* dan bukannya *trickle-down*, sehingga proses pembangunan terus memperbesar kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Sedangkan menurut Andre Gunder Frank (Nurhadi, 2007: 26) salah satu penyebab kemiskinan adalah pola hubungan ekonomi-politik antar bangsa yang timpang, yang selanjutnya dikenal sebagai Teori Ketergantungan (*Dependence Theory*). Pola hubungan antara Negara berkembang dan negara maju berada dalam posisi yang timpang dimana negara-negara berkembang berada pada posisi tergantung pada negaranegara maju, dan hal ini membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan negara berkembang.

Kemudian Oscar Lewis (Nurhadi, 2007:27) menambahkan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah factor

kebudayaan. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurutnya, kaum miskin tidak dapat terintegrasi ke dalam masyarakat luas, bersifat apatis, dan cenderung menyerah pada nasib.

Sedangkan Pengentasan kemiskinan menurut Nurhadi (2007: 40-41), dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu: (1) pendekatan peningkatan pendapatan, dan (2) pendekatan pengurangan beban.

Kedua pendekatan tersebut ditopang oleh 4 (empat) pilar utama, yaitu:

Pilar pertama, yaitu perluasan kesempatan kerja dimaksudkan sebagai menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Pilar kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat mengandung maksud bahwa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk berdiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.

Pilar ketiga, yaitu peningkatan kemampuan/ human capital dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individual/ kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial).

Pilar keempat, yaitu perlindungan sosial memiliki makna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan (*vulnerable*), misalnya pengemis, lansia, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, korban konflik sosial, serta mereka yang terkena dampak krisis ekonomi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya tidak jarang politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh Negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya yakni memberikan pelayanan publik (*public service*).

Di Indonesia, implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, yang memberikan otoritas pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (*output*) yang jelas.

Merilee S. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. **Grindle** menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan **Van Meter** dan **Horn**

bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy Stakeholders*).

Grindle (1980) dalam **Agustino** mengemukakan model pendekatan implementasi publik yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh **Grindle**, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan dari kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut **Grindle** dalam **Suharno**, dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Azas, Arah Kebijakan dan Tujuan

Dalam penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki Azas, Arah Kebijakan dan Tujuan, sehingga adanya landasan sebagai pedoman dalam menjalankan kinerja ataupun tugas dan fungsi pemerintahan yaitu :

1.1 Berdasarkan azas :

1. Partisipatif

Yang dimaksud adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Transparansi

Adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi ataupun keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

3. Akuntabilitas

Adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keadilan Sosial

Adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu, diharapkan tidak adanya diskriminasi sesama warga masyarakat baik dalam hal pelayanan administrasi, pembagian adanya bantuan

program, pemerataan hasil pembagunan (kerja sama).

5. Keberlanjutan

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian. (UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu : arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3 Tujuan

Penanggulangan kemiskinan Daerah ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan Kemiskinan di

Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura

2.1 Program-program Pemerintah

Kecamatan Mempura merupakan daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tidak tertinggi dan tidak pula terendah di Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan adanya program-program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Siak termasuk Kecamatan Mempura dan dijalankan sesuai dengan prosedur.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadissosnakertran) Siak Bapak Nurmansyah dalam Go Riau, mengatakan:

“...Menekan angka kemiskinan menjadi program prioritas bagi Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, dan wakilnya Drs H Alfedri MSi sejak memimpin Siak tahun 2011 lalu, keseriusan ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak...”

Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah tertera dalam Perda, diantaranya yaitu :

a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Tujuan utama dari program ini adalah untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Siak. Program-programnya yaitu :

- Subsidi beras miskin (Raskin)
- Sembako murah dua kali dalam setahun
- Pembangunan rumah layak huni (RLH) rata-rata 180 unit pertahun

- Beasiswa keluarga miskin
- Bantuan sosial peralatan sekolah keluarga miskin dan penyandang cacat
- Bantuan rumah tangga miskin, lansia terlantar Rp, 200.000, perbulan Serta bantuan sosial kepada yatim piatu dan masih banyak lainnya.

Dengan adanya bantuan program-program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu memperbaiki angka kemiskinan di Kecamatan Mempura serta terbantunya perekonomian masyarakat. Karena bantuan seperti bantuan subsidi beras miskin (Raskin), bantuan Rumah Layak Huni (RLH) dan pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap kepala keluarga. Sehingga keluhan-keluhan masyarakat merasa didengar dan terpenuhi terpenuhi, dan adanya kepuasan masyarakat dengan kepemimpinan Pemerintahnya.

b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat miskin sangat penting untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan berkelanjutan penanggulanga kemiskinan agar masyarakat/individu miskin dapat berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh lagi kedalam kemiskinan. Program berbasis pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari :

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
- pelatihan otomotif
- menjahit
- bordir
- pengelasan dan
- manajemen kewirausahaan

Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dapat didorong upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Daerah masing-masing. Sehingga program yang disusun memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat miskin. Menurut Aisah Hamzah dalam jurnal Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia: Realita dan Pembelajaran, mengatakan;

“...Memposisikan masyarakat miskin sebagai objek yang tidak berdaya dengan lebih banyak memberikan bantuan ketimbang memberdayakan akan menciptakan ketergantungan, melemahkan daya inovatif, kreatifitas, dan daya juang serta daya saing masyarakat...”

c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Selain program kemiskinan berbasis pemberdayaan, ada juga program kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro atau kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dimana Pemerintah memberikan penyediaan permodalan berupa Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP) dan Kredit.

Menurut Pembina Kecamatan Mempura,

“...Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah “Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam seperti Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) di setiap Kecamatan termasuk Kecamatan Mempura menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, juga

mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar dapat memperbaiki perekonomian masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Mempura...”

Menumbuh kembangkan UEK-SP tersebut dinilai sangat erat karena dapat membantu masyarakat ekonomi lemah dalam penyediaan modal usaha yang mudah, murah, ringan dan cepat. Hal ini sesuai dengan salah satu arah pembangunan masyarakat desa, yaitu pemihakan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Sama halnya dengan UEK-SP, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki tujuan yaitu meningkatkan akselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja di Kecamatan Mempura.

Menurut Syukriadi salah seorang warga Kecamatan Mempura mengatakan :

“...Dengan adanya program bantuan UEK-SP ini, saya selaku masyarakat yang memiliki usaha kecil seperti warung ini merasa terbantu, sehingga dana bantuan tersebut dapat saya gunakan untuk membeli bahan-bahan isi warung, sehingga dapat menarik konsumen untuk berbelanja diwarung saya dan juga saya mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari sebelumnya...”

d. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Program-program lain yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin yaitu :

- bantuan alat dan bibit pertanian

- perikanan, perkebunan dan peternakan
- bantuan KUBE
- bantuan zakat produktif dan,
- konsumtif dari BAZ serta bantuan CSR

Menurut Pembina Kecamatan Mempura mengatakan bahwa :

“...pemberian bantuan bantuan dan bibit pertanian dari pemerintah berupa pencetakan sawah, rehabilitasi sawah terlantar dan pengembangan perkebunan sawit rakyat. Bantuan ini bertujuan agar masyarakat dapat memanen hasil pertanian seperti beras dan dijadikan sebagai bahan pangan yang tidak perlu dibeli lagi. Selain itu, ada juga bantuan ternak sapi yang diajukan oleh masyarakat melalui proposal. Pemeliharaan ternak sapi sangat menguntungkan, karena sapi ini dapat terus melahirkan tiap satu tahun sekali. Serta bantuan lainnya sangatlah bermanfaat bagi kebutuhan warga miskin yang ada...”

Program lainnya ini di bertujuan agar warga miskin memiliki pekerjaan dan usaha yang layak, sehingga pengangguran yang ada dapat mengalami penurunan. Dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan kebutuhan yang terpenuhi bagi warganya merupakan suatu keberhasilan pemerintah atas kinerja dan juga program-program yang diterapkan.

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai kebutuhan. SDM juga merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia, misalnya seperti :

a. Pendidikan

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan-tujuan organisasi dapat mudah untuk tercapai.

Menurut Bapak Drs. Saifullah MM yang merupakan Pembina Kecamatan Mempura mengatakan :

“...Pendidikan adalah yang utama yang harus di dapat oleh setiap warga Negara, yang mana pendidikan dapat memerangi segalanya, yaitu seperti kebodohan, kemiskinan, dan ketidaktahuan yang dapat menyebabkan kita dibodohi oleh yang sesama. Sehingga Pemerintah Kabupaten Siak sendiri memiliki program di bidang pendidikan, untuk mendorong setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, serta dapat saling membagi ilmu tersebut. Program pendidikan di Kabupaten Siak menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 yaitu, program belajar 12 Tahun, mulai dari Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Hingga Tingkat Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK)...”

b. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan lingkungan yang baik umumnya akan membentuk karakter yang baik juga. Sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia misalnya seperti lingkungan tempat tinggal,

lingkungan bermain, lingkungan pendidikan dan lain-lain.

Menurut Efi Kelana yang merupakan salah satu staf di Kecamatan Mempura mengatakan :

“...Lingkungan yang dapat memberi pengaruh positif bagi setiap masyarakat yaitu dengan menciptakan lingkungan yang baik juga, misalnya dengan adanya Remaja Masjid, di adakannya belajar agama bagi anak-anak disetiap hari minggu pagi, Karang Taruna. Remaja Masjid biasanya memiliki keanggotaan laki-laki, seperti menyiapkan persiapan solat jumat, (membersihkan masjid, dan lain-lain). Setiap Minggu Pagi pukul 7 hingga pukul 10 pagi, anak-anak berkumpul dimasjid untuk belajar agama bersama, sehingga saling membagi ilmu serta saling membimbing pada saat membaca Al-quran...”

c. Kinerja Pegawai (Pemerintah)

Kinerja yang baik bagi pegawai ialah yang memiliki beberapa unsur, yaitu :

1. Prestasi Kerja (Achievement)

Yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas.

2. Keahlian (Skill)

Yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankan padanya. Dalam setiap Kinerja yang dimiliki oleh setiap pegawai pemerintah harus dapat memiliki skill ataupun keahlian dibidang computer dan bidang lainnya yang dikuasinya.

3. Perilaku (Attitude)

Yaitu sikap atau tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam

tugas-tugasnya, Perilaku disini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.

4. Kepemimpinan (Leadership)

Merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk dalam hal pengawasan.

Seorang Leadership harus dapat menjadi panutan bagi bawahannya, membimbing dalam bekerja, mengawasi setiap melakukan tugas-tugasnya.

2.3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Sedangkan ketua TKPKD adalah Wakil Bupati. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mempunyai tugas, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dan
- b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.

a. Jenis dan Manfaat yang dihasilkan dengan adanya TKPKD Kabupaten Siak Sri Indrapura

Tujuan utama dengan dibentuknya TKPKD adalah dapat menurunkan angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Siak sesuai dengan target penurunan tingkat Nasional dan target penurunan Tingkat Provinsi. Tujuan dan manfaat dibentuknya TKPKD menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 adalah TKPKD melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak

Pengkoordinasian program penanggulangan kemiskinan sangat penting dilakukan karena dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Karena dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara nasional dan membutuhkan kerja sama antar sektor.

Koordinasi di tingkat daerah yang dilakukan TKPKD Kabupaten Siak antara lain, secara berskala melakukan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD di lingkungan Kabupaten Siak. Rapat koordinasi tersebut membahas kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Siak. Proses penganggaran yang berpihak kepada pada penanggulangan kemiskinan, sosialisasi basis data terpadu untuk program-program sosial, intervensi program yang menjadi skala prioritas terhadap kantong-kantong kemiskinan, monitoring program dan pendampingan prioritas anggaran dalam pembahasan musrembang Kabupaten Siak serta sosialisasi data dengan pihak perangkat Kampung, Kecamatan, pihak swasta, PNPM dan stakeholders serta pengamatan lembaga TKPKD Kabupaten Siak.

2. Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta

melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Strategi penanggulangan tersebut terdapat dalam program Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak.

3. Melakukan Pemantauan (monitoring) Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan jika pemerintah mengetahui apa kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan. Sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi baik memberikan alat dan kemampuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan tersebut. Salah satu tugas TKPKD dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah pengendalian pelaksanaan program kemiskinan.

Pemantauan menyediakan informasi tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang diperlukan untuk tujuan pengendalian program. Salah satu staf SKPKD mengatakan :

“...Informasi yang dibutuhkan dari pemantauan berkaitan dengan pertanyaan pokok yaitu, apakah program dan tahapannya dilaksanakan sesuai desain dan prosedur, apakah program atau tahapan program dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, apakah anggaran program terserap sesuai dengan rencana, dan apa masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik yang telah diantisipasi maupun yang belum untuk selanjutnya dicoba diatasi...”

Dengan dilakukannya pemantauan (monitoring), TKPKD Kabuapten Siak dapat mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan dan pelayanan program yang berjalan dan memberikan penilaian terhadap keberhasilan program yang ada.

b. Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan di koordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinaan (TNP2K) secara Nasional. Sedangkan pelaksanaan di Kabupaten/Daerah di koordinasikan oleh TNP2K. TNP2K melakukan pengkoordinasian dengan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dengan menyusun rencana srategi SKPD, menyusun rancangan RKPd dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. Setelah melakukan pengkoordinasian dengan SKPD terkait, Implementasi Program penanggulangan diserahkan kepada SKPD terkait.

Setelah program penanggulangan kemiskinan di implementasikan, TKPKD melakukan pengendalian terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengendalian dimaksud dalam penanggulangan kemiskinan sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 adalah :

1. melakukan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

3. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan
4. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diberikan adalah adanya strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah yaitu:

Pemerintah Kabupaten Siak serta Kecamatan Mempura telah melakukan kinerja yang sangat baik, dimana angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Mempura dapat berkurang, serta masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah yang dapat membantu kehidupan dan perekonomian masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dengan adanya Sumber Daya Manusia yang baik dan juga adanya Koordinasi yang di lakukan untuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sehingga program-program kemiskinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta adanya komunikasi yang baik antara atasan da bawahan.

SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Siak dan Kecamatan Mempura terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak dan Kecamatan Mempura lebih tegas dalam hal mensurvey data penduduk, bahwa penerima bantuan dari adanya program kemiskinan tersebut adalah benar-benar masyarakat miskin yang tidak mampu.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak dapat selalu

mempertahakan dan meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, sehingga masyarakat miskin dapat berkurang ditiap tahunnya.

3. Komunikasi yang baik perlu terjadi antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga aspirasi, keluhan dan masukan yang ada dapat menjadi pedoman terlaksananya suatu kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto
- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Khomsan, Ali, dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Kusnanto. 2008. *Metode Kualitatif, Penelitian Kualitatif*. IKM, Pascasarjana. Yogyakarta : UGM

Marzuki, MM. 2003. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT. Prasetia Widia Pratama

Conyer, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : UGM Press

Bank, The World. 2007. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta. The World Bank Office Jakarta.

DOKUMEN

- Restra Kecamatan Mempura 2011-2016
- RPJMD Kabupaten Siak Sri Indrapura 2011-2016

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah (PERDA) No 10 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

SKRIPSI

Dasril Arifin. 2013. *Peran Dinas Sosial terhadap penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Siak (studi kasus di Kecamatan Sei Mandau)*.

Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim.

Joni Yusuf. 2008. Pemikiran Muhammad
Yunus tentang pengentasan
kemiskinan dalam persepektif hukum
islam. Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Nurul Huda Mohsin. 2016. Upaya
Pemerintah Kabupaten Kampar
dalam mewujudkan zero
pengangguran tahun 2013-2014.
Universitas Riau.

SUMBER LAINNYA

TNP2K, 2013. Strategi Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, Tim
Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), <http:tnp2k.go.id/>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak tahun
2015

<http://firmansyahsikumbangblogspot.com./2012/06/masalah-dan-strategi-pengentasan.html>